

KONSTRUKSI MATERI DAN PRAKSIS PEMBELAJARAN SEJARAH KONTROVERSIAL G-30-S/PKI ERA POST TRUTH

Yudi Hartono¹, Khoirul Huda², Rani Lily Arseat²

^{1,2}Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Madiun

Email: yudihartono@unipma.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap konstruksi materi, praksis pembelajaran, dan reproduksi pengetahuan sejarah kontroversial G-30-S/PKI, serta pertautan dengan konteks di luarnya, yaitu situasi masyarakat Indonesia pasca Reformasi dan fenomena era post truth. Metode penelitian kualitatif eksploratif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data divalidasi dengan triangulasi sumber. Analisis data dengan analisis wacana kritis dari Fairclough. Hasil penelitian menemukan bahwa konstruksi materi G-30-S/PKI merepresentasikan situasi masyarakat Indonesia pasca Reformasi yang ditandai dengan dimasukkannya berbagai versi serta digunakannya istilah G 30 S dan G-30-S/PKI sekaligus, namun dalam praksis pembelajaran dan reproduksi pengetahuan di masyarakat masih didominasi satu versi yang ditandai dengan penggunaan media film G-30-S/PKI dan sumber pengetahuan lain dalam versi yang sama. Terdapat pertautan antara wacana (teks/materi), praksis pembelajaran, dan reproduksi pengetahuan sejarah kontroversial Gerakan 30 September 1965 dengan konteks masyarakat Indonesia pasca Reformasi yang secara umum masih menyimpan memori traumatik tentang komunisme, faktor kebijakan pemerintah terhadap pendidikan sejarah, serta fenomena era post truth.

Kata Kunci: Konstruksi Materi, Praksis Pembelajaran, Sejarah Kontroversial, Post Truth

Abstract

This study aims to reveal the construction of materials, learning praxis, and reproduction of the controversial historical knowledge of the G-30-S/PKI, as well as the relationship with the context outside, namely the situation of post-Reformation Indonesian society and the phenomenon of the post-truth era. Explorative qualitative research method. Collecting data by interview, observation, and study documentation. Data were validated by triangulation of sources. Data analysis with critical discourse analysis from Fairclough. The results of the study found that the material construction of the G-30-S/PKI represented the situation of Indonesian society after the Reformation, which was marked by the inclusion of various versions and the use of the terms G 30S and G-30-S/PKI at once, but in the practice of learning and reproducing knowledge in society. still dominated by one version which is marked by the use of the G-30-S/PKI film media and other sources of knowledge in the same version. There is a link between discourse (text/material), learning praxis, and reproduction of controversial historical knowledge of the 30 September 1965 Movement with the context of post-Reformation Indonesian society, which in general still retains traumatic memories of communism, government policy factors for historical education, and the phenomenon of the post-truth era. .

Keywords: Material Construction, Learning Practice, Controversial History, Post Truth

PENDAHULUAN

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S atau dalam kurikulum dan buku ajar di sekolah ditulis G-30-S/PKI, merupakan materi kontroversial dalam sejarah Indonesia. Pembelajaran sejarah kontroversial dapat melatih keterampilan berpikir kritis siswa. Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang penting di abad ke-21 yang diistilahkan dengan 4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and Innovation). Siswa dengan

kemampuan berpikir kritis atau keterampilan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skill/HOTS) cenderung mampu mengkaji ulang pendapat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.

Seseorang yang berpikir kritis akan mengkaji ulang keyakinan dan pengetahuan dirinya atau orang lain logis atau tidak (Syahmani, 2013). Pembelajaran sejarah juga bertujuan untuk membangun pola berpikir kritis-historis, bukan hanya membangkitkan rasa kesadaran sejarah peserta didik. (Kuntowijoyo, 2005)

Keterampilan berpikir kritis semakin penting di era post truth. Post-truth berarti pasca atau setelah kebenaran. Akal sebagai landasan kebenaran serta pengamatan fakta sebagai standar obyektivitas seakan tidak penting lagi dalam mempengaruhi opini, pemikiran, ataupun perilaku masyarakat yang mementingkan sensasi dan emosi (Haryatmoko, 2017).

Peristiwa G 30 S yang ditengarai dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia merupakan wilayah perdebatan sejarah yang dapat menyulitkan posisi guru (Krisnadi, 2006). Kontroversi G 30 S menjadi tantangan tersendiri bagi guru, terlebih guru sejarah di Madiun yang sebelumnya pernah terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1948. Penelitian Aquarta dan Soebijantoro di Kelurahan Wungu Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa peristiwa G 30 S masih berpengaruh terhadap kondisi psikologis masyarakat hingga saat ini (Aquarta, M., 2014).

Kontroversi dalam ilmu sejarah pada hakikatnya merupakan kewajaran, namun menjadi kesulitan tersendiri dalam pembelajarannya (Widiadi, A.N., Wahyudi, & Ahmad, 2013). Para ahli menyarankan agar pembelajaran materi sejarah kontroversial tidak sebatas metanaratif, tetapi narasi historistik yang bertumpu pada hari ini (Widiadi, A.N., Wahyudi, & Ahmad, 2013). Dalam praksisnya, guru dihadapkan pada berbagai kendala karena perubahan corak historiografi Indonesia pasca Reformasi.

Materi sejarah kontroversial G-30-S/PKI merupakan isu sensitif bagi bangsa Indonesia, terlebih lagi di era post truth. Di media online berkembang berbagai wacana dan narasi peristiwa G-30-S/PKI yang berbeda dengan di sekolah. Hal tersebut dapat memunculkan asumsi bahwa sejarah telah membingungkan guru, dan guru membingungkan siswa, sehingga dapat memicu ketidakpercayaan terhadap pembelajaran sejarah. Keterampilan berpikir kritis semakin diperlukan dalam mempelajari materi sejarah kontroversial G-30-S/PKI.

Pembelajaran materi sejarah kontroversial G-30-S/PKI dihadapkan pada tantangan dalam wacana dan praksisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi materi, praksis pembelajaran, dan reproduksi pengetahuan sejarah kontroversial G-30-S/PKI, serta pertautan dengan konteks di luarnya, yaitu situasi masyarakat Indonesia pasca Reformasi dan fenomena era post truth melalui analisis wacana kritis dari Fairclough bahwa praktik pewacanaan merupakan pilar utama dalam memproduksi pengetahuan melalui sebuah teks yang dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial .

Teks berkaitan dengan linguistik, semantik, tata kalimat, koherensi dan kohesivitas, serta keterhubungannya dalam membentuk sebuah makna yang memiliki fungsi representasi, relasi, dan identitas secara bersamaan dalam menampilkan realitas ke dalam sebuah teks. Praktik wacana berkaitan dengan pemrosesan wacana, meliputi aspek hasil, desiminasi, dan penggunaan teks. Praktik sosial berkaitan dengan konteks di luar teks, seperti konteks sosial politik tertentu yang mempengaruhi wacana. Penelitian diharapkan dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan materi dan transformasi model pembelajaran materi sejarah kontroversial G 30 S yang lebih dapat membangun kesadaran krisis siswa, aktual, dan relevan dengan jiwa zaman.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode eksploratif. Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten dan Kota Madiun. Pemilihan sampel dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data melalui

wawancara mendalam, observasi non partisipasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan guru, siswa, dan masyarakat umum. Observasi dilakukan terhadap pembelajaran di kelas. Analisis dokumen dilakukan dengan menganalisis kurikulum, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan isi buku pelajaran sejarah. Validasi data dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari satu sumber dengan sumber lain.

Analisis data dengan analisis wacana kritis Fairclough (Fairclough, 2003) yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Analisis teks dilakukan terhadap aspek-aspek linguistik, semantik, tata kalimat, koherensi dan kohesivitas, serta keterhubungannya dalam membentuk sebuah makna yang berfungsi representasi, relasi-relasi, dan identitas secara bersamaan dalam menampilkan realitas ke dalam sebuah teks. Praktik wacana difokuskan pada pemrosesan wacana yang meliputi aspek hasil, desiminasi, dan penggunaan teks. Praktik sosial difokuskan pada konteks di luar teks, seperti konteks sosial politik tertentu yang mempengaruhi wacana. Berdasarkan ketiga dimensi tersebut kemudian dianalisis, sehingga ditemukan pertautan antara teks/materi G 30 S dalam praksis pembelajaran dengan konteks di luarnya, yaitu konteks masyarakat Indonesia pasca Reformasi dan era post truth.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah SMA menggunakan istilah G-30-S/PKI. Materi sejarah G-30-S/PKI terdapat di kelas XII Semester Gasal. Berikut posisi materi sejarah kontroversial G 30 S dalam Kurikulum 2013 SMA.

Tabel 1. Posisi Materi Sejarah Kontroversial G 30 S dalam Kurikulum 2013 SMA

Kelas	Kompetensi Dasar	Materi
II	<p>Mengevaluasi upaya bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Andi Aziz, Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), dan G-30-S/PKI)</p> <p>Mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.</p>	<p>Upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan</p> <p>Kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.</p>

Pada buku Sejarah Indonesia SMA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karangan Abdurakhman, Pradono, Sunarti, dan Zuhdi (2018), tidak ada materi khusus tentang G 30 S. Materi tersebut dimasukkan ke dalam materi “Peta Kekuatan Politik Nasional” yang merupakan sub materi dari materi utama “Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin.” Materi tersebut berisi kekuatan-kekuatan politik dalam pentas nasional di era Demokrasi Terpimpin, yaitu Angkatan Darat (AD), PKI dan Soekarno. Diantara kekuatan-kekuatan politik tersebut, hubungan antara AD dengan PKI adalah yang paling panas. Kelak PKI akan memberontak, dan AD menumpasnya

Materi diawali dengan pemaparan 7 (tujuh) versi interpretasi atau teori dengan menggunakan istilah G 30 S. Ketujuh versi tersebut adalah: 1) Konflik internal Angkatan Darat (AD); 2) Skenario dinas intelijen Amerika Serikat (CIA); 3) Pertemuan kepentingan Inggris-AS; 4) Soekarno dalang G 30 S; 5) Teori Chaos; 6) Soeharto dalang G 30 S; dan 7) PKI dalang G 30 S (Abdurakhman, Pradono, A., Sunarti, L., & Zuhdi, 2018).

Dinyatakan bahwa terlepas dari versi atau teori mana yang benar, yang pasti bahwa sejak tahun 1959 masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia didominasi oleh figure Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga menjadi penengah antara AD dan PKI, dua kelompok politik besar yang saling bersaing. PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap AD. Usulan pembentukan angkatan ke-5 oleh PKI pada awal 1965 semakin memperburuk situasi. PKI juga menyebarkan isu Dewan Jenderal di kalangan AD yang sedang bersiap merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Sebagai buktinya adalah sebuah yang ditandatangani oleh Gilchrist, Duta Besar Inggris untuk Indonesia 1962-1963, sehingga disebut Dokumen Gilchrist.

Dipaparkan pula aksi-aksi PKI terhadap kelompok-kelompok di masyarakat yang menjadi lawan politik PKI. PKI mengecam kelompok pendukung Manifesto Kebudayaan (Manikebu) yang tidak menginginkan kebudayaan nasional Indonesia didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu. Di daerah-daerah, PKI melancarkan aksi sepihak terhadap mereka yang disebut “Tujuh Setan Desa” untuk mengambil alih tanah secara paksa. PKI juga menuduh para pejabat yang tidak mendukung PKI sebagai kapitalis birokrat yang korup.

Pertentangan PKI dengan AD dan kelompok-kelompok di masyarakat semakin memanas menjelang 30 September 1965. Ditambah lagi kondisi Presiden Soekarno yang secara tiba-tiba jatuh sakit dan diprediksi meninggal dunia atau lumpuh. PKI memutuskan untuk bergerak dengan menculik dan membunuh beberapa jenderal TNI AD pada dini hari 1 Oktober 1965 dibawah komando Letnan Kolonel Untung.

Pagi harinya pada berita RRI, Letnan Kolonel Untung menyatakan dibentuknya “Dewan Revolusi” yang membingungkan masyarakat. Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) saat itu, memutuskan untuk mengambil alih pimpinan AD. Operasi penumpasan G 30 S dilakukan di Jakarta dan daerah lain yang menjadi basis PKI. G 30 S pun berhasil ditumpas.

Pada Bab 3 juga terdapat materi tentang G 30 S. Kontruksi materi pada bab ini lebih banyak diwarnai oleh konflik antara AD dan PKI yang diawali dengan materi tentang tindakan AD terhadap PKI. TNI AD mencurigai ada upaya dari PKI melakukan kekacauan di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Pimpinan TNI AD mengambil tindakan melarang terbitnya surat kabar Harian Rakyat milik PKI dan memerintahkan untuk menangkap Aidit dan kawan-kawan. Kegiatan-kegiatan PKI di daerah dibekukan, meskipun tidak disetujui oleh Presiden Soekarno yang melarang Penguasa Perang Daerah (Peperda) mengambil tindakan politis terhadap PKI (Abdurakhman, Pradono, Sunarti, Zuhdi, 2018).

Selanjutnya materi tentang isu yang menjadikan PKI merasa tersudutkan. Pada akhir 1964 ditemukan dokumen rahasia milik PKI yang menyebut akan melakukan kudeta. Aidit, pimpinan PKI, menyebut dokumen itu palsu. Dokumen milik PKI menjadi isu politik besar. Presiden Soekarno mengumpulkan para pemimpin partai agar menyelesaikan secara musyawarah karena Indonesia sedang menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Namun, PKI justru membalas tindakan TNI AD dengan melakukan berbagai upaya untuk melemahkan pembinaan teritorial oleh TNI AD.

Pada Bab IV terdapat materi tentang naiknya Soeharto sebagai presiden pasca G 30 S. G 30 S dinyatakan sebagai akhir kekuasaan Presiden Soekarno dan akhir kekuatan politik PKI. Peristiwa G 30 S menyebabkan kemarahan rakyat, kekacauan politik dan keamanan, serta perekonomian yang semakin terpuruk dengan inflasi mencapai 600% (Abdurakhman, Pradono, Sunarti, Zuhdi, 2018).

Pada konstruksi materi di atas, istilah G 30 S digunakan di awal-awal materi untuk menjelaskan berbagai versi, sedangkan istilah G-30-S/PKI digunakan dalam kronologi peristiwa hingga akhir-akhir materi. Materi diakhiri dengan naiknya Letnan Jendral Soeharto sebagai Presiden yang tidak lepas dari Peristiwa G 30 S. Berbagai versi interpretasi peristiwa G 30 S belum diungkap dan disajikan secara lengkap kelemahan masing-masing serta belum diintegrasikan ke dalam kronologi peristiwanya. Versi

yang telah disebutkan kelemahannya adalah versi konflik internal AD dan versi Soekarno adalah dalang G 30 S. Sementara kronologi peristiwa lebih banyak diwarnai konflik antara PKI dan AD.

Pembahasan

Analisis Teks/Materi

Dimensi teks/materi G 30 S tergambar dalam Kurikulum Sejarah 2013, Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan buku pelajaran sejarah. Sejak Reformasi terjadi perubahan dalam wacana kesejarahan di Indonesia. Berbagai gugatan muncul terhadap produk sejarah versi pemerintah di berbagai media, diantaranya tentang kontroversi sejarah G 30 S. Menurut Purwanto kontroversi terjadi dalam konteks sejarah sebagai bahan ajar ataupun kurikulum sebagai hasil kebijakan birokratis-akademis. Kontroversi tidak menjadi persoalan pada masa pemerintahan Orde Baru karena hanya ada satu versi dari pemerintah (Purwanta, 2012).

Kontroversi sejarah G 30 S sebenarnya telah dimulai pada Desember 1965 ketika Jenderal Nasution menugaskan Dosen Universitas Indonesia (UI) Jakarta untuk menyusun buku "40 Hari Kegagalan G 30 S". Versi militer tersebut kemudian dijadikan versi pemerintah. Pada 1975, Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 yang disunting oleh Nugroho Notosusanto dijadikan rujukan untuk siswa SMA dan SMP. Kritik dilakukan oleh sejawaroh Sartono Kartodirdjo dengan mengundurkan diri sebagai tim penulis Sejarah Nasional Indonesia (Arta, 2011).

Pada kurikulum 2004, kata PKI sempat terhapus sehingga dalam teks hanya tertulis G 30 S. Kontroversi sejarah G 30 S bergulir kembali. ketika Kejaksaan Agung memeriksa buku-buku yang dilanjutkan dengan pelarangan terhadap buku pelajaran sejarah SMP dan SMA yang tidak menuliskan kata PKI di belakang G 30 S. Buku-buku tersebut dinilai tidak sesuai dengan kurikulum dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Penggunaan istilah G-30-S/PKI dikritik sejarawan Aswi Warman Adam. Menurutnya, lebih objektif apabila peristiwa itu disebut sebagai G 30 S, bukan G 30 S/PKI ataupun Gestapu (Gerakan Tiga Puluh September, sebuah akronim yang kurang tepat). Istilah Gestapu memiliki konotasi negatif dan menakutkan karena dikaitkan dengan Gestapo (Jerman). Penambahan istilah G 30 S dengan tanda baca strip dan kata PKI menjadi G-30-S/PKI merupakan interpretasi bahwa PKI terlibat atau menjadi dalang dan peristiwa tersebut. Versi ini masih perlu diperdebatkan, apakah benar PKI sebagai sebuah partai yang terlibat dan menjadi dalang (Adam, 2009).

Penggunaan istilah G 30 S dan G-30-S/PKI masih menjadi perdebatan. Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah menggunakan istilah G-30-S/PKI, sementara buku pelajaran sejarah mengakomodasi berbagai versi dengan menggunakan istilah G 30 S, namun dalam kronologi peristiwanya menggunakan istilah G-30-S/PKI. Dimasukkannya berbagai versi dan digunakannya istilah G 30 S dan G-30-S/PKI sekaligus dalam kontruksi materi, merepresentasikan situasi masyarakat Indonesia pasca Reformasi. Istilah G 30 S lebih netral, sementara istilah G-30-S/PKI merujuk pada satu versi.

Analisis Praktik Wacana

Dimensi praktik wacana G 30 S dapat ditelisik dari produksi wacana dan praksis pembelajaran materi G 30 S. Menurut Sunarti, salah seorang anggota Tim Penyusun Buku Sejarah SMA Kelas XII dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada progress dalam buku pelajaran yang dikeluarkan pemerintah mengenai peristiwa G 30 S. Buku tersebut selain memuat versi pemerintah, juga memuat berbagai versi yang lain. Dimasukkannya berbagai versi tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan para siswa dari pengaruh informasi yang tidak valid. Sekolah juga diperbolehkan menggunakan sumber buku sejarah lain sebagai bahan diskusi (Lane, 2015). Dalam praksis pembelajaran, guru masih menggunakan media film G 30 S/PKI.

Analisis Praktik Sosial

Dimensi praktik sosial terkait dengan konteks di luar teks yang mempengaruhi wacana. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih menyimpan memori traumatik tentang peristiwa G 30 S. PKI merupakan isu sensitif bagi masyarakat Indonesia, terlebih di Madiun dan sekitarnya yang pernah mengalami peristiwa tahun 1948.

Sensivitas isu PKI tampak misalnya pada reaksi masyarakat Indonesia dengan kemunculan kembali logo PKI seperti di kawasan pertokoan di Depok Jawa Barat. Pedagang yang menjual Kaos PKI ditangkap oleh aparat kepolisian setempat. Pada 15 Agustus 2015, simbol-simbol PKI muncul di Pamekasan dan Jember Jawa Timur. Beberapa warga membawa foto tokoh PKI seperti Aidit dan Nyoto pada Hari Ulang Tahun RI ke-70) (Suparjan, 2016).

Di Madiun terjadi demonstrasi besar-besaran pada Rabu, 30 September 2015 oleh beberapa organisasi yang tergabung dalam perkumpulan Gerakan Bela Negara (GBN). Selain orasi yang menyebut tidak ada tempat bagi komunis di NKRI, juga Baliho bertuliskan, “Ganyang PKI, Tegakkan Pancasila...”, PKI No.....Pancasila Yes, NKRI Harga Mati. Dalam pernyataan sikap, diantaranya meminta DPR, MPR dan pemerintah untuk tetap mempertahankan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 tentang larangan Ajaran Marxisme/Leninisme dalam segala bentuk dan melaksanakan UU No. 27 Tahun 1999 tentang Keamanan Negara dengan melarang penyebaran ajaran komunisme.

Faktor luar lain yang berpengaruh adalah kebijakan pemerintah terhadap pendidikan sejarah, seperti Keputusan Jaksa Agung melarang buku-buku pelajaran sejarah yang tidak memuat materi pemberontakan PKI 1948 dan G 30 S. Meskipun pendidikan sejarah pada dasarnya dapat digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen cinta tanah air dan nasionalisme, namun campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dapat berimplikasi pada pendidikan sejarah sebagai alat legitimasi. Penelitian Purwanta yang mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam pendidikan sejarah menunjukkan bahwa buku pelajaran sejarah pada masa Orde Baru didominasi oleh integrasi vertikal dan sangat kurang dalam pembahasan integrasi horizontal (Purwanta, 2012).

Pasca Reformasi mulai terbuka diskusi secara bertahap. Namun demikian, konteks sosial politik masyarakat Indonesia yang masih menyimpan memori traumatik tentang komunisme mempengaruhi wacana sejarah kontroversial G 30 S. PKI merupakan isu sensitif bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan sejarah berpengaruh terhadap praksis pembelajaran materi G 30 S. Konteks di luar teks berpengaruh secara dominan dalam wacana dan praksis pembelajaran materi G 30 S.

Distribusi pengetahuan G 30 S masih didominasi oleh buku-buku versi pemerintah dan guru melalui pembelajaran di sekolah. Pengetahuan tentang peristiwa G 30 S, dengan demikian, juga tidak lepas dari cara-cara umum distribusi pengetahuan tersebut sebagai dampak dari situasi sosial traumatik, terlepas dari persoalan kesahihan atau ketidaksahihan. Dari proses tersebut terbentuklah realitas yang dianggap sudah sewajarnya.

Generasi milenial, selain memperoleh pengetahuan dari orang-orang tua juga dari buku-buku pelajaran di sekolah dan media sosial. Pengetahuan dari orang tua relatif belum berubah bahwa PKI adalah dalang peristiwa. Sementara di buku-buku pelajaran memperoleh pengetahuan berbagai versi peristiwa G 30 S, namun juga masih mendapatkan pengetahuan dari film G 30 S versi pemerintah.

Pada generasi milenial, distribusi pengetahuan tidak lagi didominasi oleh orang tua, pemerintah dan guru melalui pembelajaran di sekolah, melainkan juga media sosial. Proses tersebut pada akhirnya juga membangun pengetahuan mereka tentang peristiwa G 30 S. Pengetahuan mereka tidak lagi didominasi oleh pengetahuan satu versi dari pemerintah, terlepas dari persoalan kesahihan atau ketidaksahihan. Situasi sosial telah berubah pasca Reformasi. Generasi milenial tidak lagi terbebani oleh memori traumatik sebagaimana dihadapi masyarakat generasi sebelumnya.

Ditinjau dari sosiologi pengetahuan Berger yang mengarahkan perhatiannya pada pembentukan realitas oleh masyarakat, tipifikasi cara berpikir merupakan unsur-unsur intergrasi dari dunia sosio-

kultural historis konkret yang dianggap sudah sewajarnya dan mendapat pengesahan-pengesahan masyarakat. Struktur masyarakat menentukan distribusi sosial pengetahuan dan relativitas serta relevansinya bagi lingkungan sosial yang konkret dari suatu kelompok yang konkret .

Realitas tentang peristiwa G 30 S, sejalan dengan pandangan Berger, tidak tergantung pada kehendak masing-masing individu, namun pada hubungan timbal balik antara realitas sosial yang bersifat objektif dengan pengetahuan subjektif. Realitas sosial merupakan hasil konstruksi manusia dan “berbalik” membentuk manusia. Hubungan antara manusia dan masyarakat bersifat dialektis dalam kehidupan sehari-hari.

Era post truth yang ditandai dengan fenomena media online memunculkan berbagai wacana dan narasi peristiwa G 30 S. Kontra narasi menggugat sejarah resmi muncul di media jenis baru. Media baru (media online) berpotensi sebagai media emansipatoris yang menyuarakan aspirasi pihak-pihak yang distigma dengan G 30 S (Ikhwan, H., Yulianto, V.I., & Parahita, 2019). Era post truth semakin menuntut kesadaran kritis siswa dalam mengkritisi berbagai wacana dan narasi yang berkembang tentang sejarah kontroversial G 30 S. Realitas tentang peristiwa G 30 S tidak tergantung pada kehendak masing-masing individu, namun pada hubungan timbal balik antara realitas sosial yang bersifat objektif dengan pengetahuan subjektif. Fenomena era post truth belum diakomodasi dalam praksis pembelajaran sejarah kontroversial G 30 S di sekolah sehingga kurang membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis yang semakin penting di era post truth.

SIMPULAN DAN SARAN

Terdapat pertautan antara wacana (teks, materi) sejarah kontroversial G 30 S dan praksis pembelajaran dengan konteks masyarakat Indonesia pasca Reformasi yang secara umum masih menyimpan memori traumatis tentang komunisme, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pendidikan sejarah, serta munculnya fenomena post truth. Konstruksi materi G 30 S merepresentasikan situasi masyarakat Indonesia pasca Reformasi yang ditandai dengan dimasukkannya berbagai versi serta digunakannya istilah G 30 S dan G-30-S/PKI sekaligus, namun dalam praksis pembelajaran masih didominasi satu versi yang ditandai dengan penggunaan media film G-30-S/PKI dan sumber lain dalam versi yang sama. Relasi-relasi dengan faktor-faktor di luar teks/materi tersebut merepresentasikan realitas Indonesia dalam transisi demokratisasi wacana kesejarahan yang masih terus berproses. Pengaruh yang dominan dari faktor-faktor luar tersebut kurang mendukung tujuan utama pembelajaran sejarah kontroversial dalam membangun kesadaran kritis siswa yang semakin penting di era post truth. Diperlukan pengembangan materi dan transformasi model pembelajaran sejarah kontroversial G 30 S yang lebih dapat membangun kesadaran kritis siswa, aktual dan relevan dengan jiwa zaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mendanai penelitian ini pada skema Penelitian Terapan Kompetitif Nasional Tahun 2022.

REFERENSI

- Abdurakhman, Pradono, A., Sunarti, L., & Zuhdi, S. (2018). *Sejarah Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Adam, A. W. (2009). *Kontroversi: Proses dan Implikasi Bagi Pengajaran Sejarah* (National Seminar, May 28, 2009 at Sebelas Maret University of Surakarta).
- Aquarta, M., S. (2014). Pengaruh Peristiwa Gerakan 30 September 1965 Terhadap Kondisi Sosio psikologis Masyarakat Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 1965-1998. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 4(2), 97–112.

- <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/ajsp.v4i02.830>
- Arta, K. S. (2011). Kurikulum dan kontroversi buku teks sejarah dalam KTSP. *Media Komunikasi FIS*, 11(1), 154–168. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/mkfis.v11i2.459>.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysing for Sosial Research*. London: Routledge.
- Haryatmoko. (2017). *Ketika Emosi Dominasi Politik*. Kompas.Id. <https://kompas.id/baca/opini/2017/11/15/ketika-emosi-dominasi-politik/>
- Ikhwan, H., Yulianto, V.I., & Parahita, G. . (2019). The Contestation of Social Memory in the New Media: A Case Study of the 1965 Killings in Indonesia. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 12(1), 3–16. <https://doi.org/doi.10.14764/10.ASEAS-0010>
- Krisnadi, I. G. (2006). *Kontroversi Seputar G 30 S 1965* (Sosialization of History Curriculum G 30 S at Hall of Education and Culture Service, Central Java, 7 December).
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Bentang Budaya.
- Purwanta, H. (2012). Evaluasi Isi Buku Teks Pelajaran Sejarah Pada Masa Orde Baru. *Cakrawala Pendidikan*, XXXI(3), 424–440. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/cp.v0i3.1551>
- Suparjan, E. (2016). Peristiwa G 30 S sebagai Isu Kontroversial pada Mata Pelajaran Sejarah di SMA Kota Bima. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1), 38–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPS>.
- Syahmani. (2013). Model Group Investigation dan Induktif sebagai Alternatif Mengembangkan Keterampilan Proses Sains dan Berpikir Siswa. *Quantum Jurnal Inovasi Pendidikan Sains*, 4(1), 59–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/quantum.v4i1.1381>.
- Widiadi, A.N., Wahyudi, & Ahmad, T. A. (2013). *Pendidikan Sejarah, Suatu Keharusan Reformulasi Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.